

Rakorda Penanggulangan Bencana Sumatera Utara Tahun 2019 Resmi Dibuka



Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakorda) Penanggulangan Bencana Sumatera Utara tahun 2019 berlangsung mulai tanggal 14 sampai 15 Maret 2019 yang dilaksanakan di Hotel Grandika, Jl. Dr. Mansyur, Kota Medan secara resmi dibuka, Kamis (14/03/2019). Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi, H. Nouval Mahyar, SH, MHum.

Dalam kata sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan oleh Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi, menyebutkan bahwa Rakorda penanggulangan bencana Sumatera Utara sangat penting dilakukan, sehingga implementasi koordinasi di lapangan juga dapat dilaksanakan, baik antara BPBD Provinsi dengan Kabupaten/Kota, begitu juga antara sesama BPBD Kabupaten/Kota.

“Kadang-kadang di masyarakat apabila timbul bencana, justru provinsi yang langsung disalahkan. Padahal itu ada kewenangannya ke Kabupaten/Kota. Sehingga kegiatan ini perlu kita adakan dalam rangka mengkoordinasikan antar BPBD yang mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lagi oleh narasumber,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara atas kesungguhan dan kerja sama yang baik demi kemanusiaan, khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing daerah Kabupaten/Kota selama ini.

Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya turut menyebutkan bahwa sebagaimana dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana Nasional, bahwa kedudukan Gubernur, Bupati dan Wali Kota saat terjadinya bencana akan menjadi Komandan Satgas Darurat.

“Hal ini menjadi arahan Presiden pada saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2019 di Surabaya. Penanggulangan Bencana sudah

menjadi urusan wajib yang mengakomodir program-program prioritas dalam konteks standar pelayanan minimal, antara lain pelayanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana,” terangnya.

Terkait hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, Gubernur mengingatkan 10 hal yang perlu diperhatikan, pertama tentang perencanaan rancangan pembangunan atau ruang masing-masing daerah yang harus memperhatikan Peta Rawan Bencana. “Dalam hal ini kedepan sudah diperlukan audit tata ruang dalam mitigasi bencana,” ujarnya.

Selanjutnya, mengintegrasikan penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), memberikan input dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Keempat tentang penanggulangan bencana dengan dukungan anggaran yang memadai secara tepat dan daya guna, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan.

Keenam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dihibahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara maksimal, meningkatkan kualitas data dan informasi pelaporan kejadian-kejadian bencana. Kesembilan, adanya pelaksanaan pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan yang tangguh bencana.

Terakhir adalah pemerintah daerah sebagai *first responder* penanggulangan bencana dan Sekretaris Daerah selaku kepala BPBD *ex-officio* terus memperkuat lembaga BPBD. "Menyiapkan dan melatih personil yang handal, serta mengalokasikan dana dan meningkatkan dukungan anggaran yang memadai," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Rakorda Penanggulangan Bencana Sumatera Utara Tahun 2019 yang juga merupakan Kabid Kerjasama Pengendalian dan Evaluasi BPBD Provinsi Sumatera Utara, Drs. Kamaruddin dalam laporannya menyampaikan Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan intensitas bencana yang sangat tinggi.

“Terdapat 12 jenis bencana yang sering terjadi di daerah ini. Peningkatan intensitas bencana dalam kurun beberapa waktu belakangan ini, mengharuskan BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja ekstra dan menghadirkan inovasi-inovasi program yang mampu meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di Sumatera Utara,” ujarnya.

Selanjutnya, BPBD di tingkat Kabupaten/Kota juga diharapkan mampu melakukan sinkronisasi program dengan BPBD Provinsi dan BNPB, serta dengan lembaga kementerian terkait yang mampu bekerjasama untuk meningkatkan mutu dan kualitas manajemen bencana.

“Berkaitan dengan hal tersebut, belajar dari pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana selama ini di daerah Sumatera Utara dan seiring semakin tingginya intensitas bencana, maka dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, terencana dan terintegrasi sehingga pengelolaan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh,” terangnya.

Drs. Kamaruddin turut menyampaikan tujuan pelaksanaan Rakorda Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara, yakni dalam upaya mensinkronisasikan dan mengimplementasikan program antara program nasional, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota dan dengan Kementerian atau lembaga terkait dalam konteks penanggulangan bencana.

Rakorda Penanggulangan Bencana Sumatera Utara Tahun 2019 turut diikuti oleh utusan dari BNPB, Jajaran ASN dilingkungan BPBD Provsu, BPBD Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, Jajaran OPD terkait di tingkat Provinsi Sumatera utara, serta dari Kementerian dan lembaga terkait.

Keterangan foto: Suasana Rapat Koordinasi (Rakorda) Penanggulangan Bencana Sumatera Utara tahun 2019 berlangsung mulai tanggal 14 sampai 15 Maret 2019 yang dilaksanakan di Hotel Grandika, Jl. Dr. Mansyur, Kota Medan, Kamis (14/03/2019).